

MASA DEPAN GERAKAN PRAMUKA

A. PERKEMBANGAN ORGANISASI KEPANDUAN

1. Pada akhir bulan September 1945 di Gedung "Balai Mataram" Yogyakarta, berkumpul beberapa orang pemimpin Pandu dari KBI, HW, SIAP, NATIPIJ, Tri Darma, KAKI (Kepanduan Asas Katholik Indonesia) dan PK (Pandu Kasultanan). Putusan itu yang terpenting adalah antara lain:
 - a. Membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia.
 - b. Mengajukan perbentukan satu organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia.
 - c. Membentuk suatu Panitia Kerja untuk melaksanakan anjuran itu.
 - d. Mengadakan secepat mungkin Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.
 Prakarsa Panitia Kesatuan Kepanduan ini diperkuat dengan kedatangan tiga orang tokoh KBI yaitu Dr. Soetarman, Soebagio dan Koernia dari Jakarta. Mereka membawa amanat Ki Hadjar Dewantara yang pada waktu menjabat Menteri PP dan K, mengajukan agar para bekas pemimpin kepanduan Indonesia menghidupkan kembali gerakan kepanduan.

Antara Panitia dan utusan dari Jakarta diadakan pembagian kerja. Panitia di Yogyakarta membuat rencana pelaksanaan putusan Panitia, dan mengadakan hubungan dengan pandu-pandu di Surakarta yang ternyata telah siap menerima anjuran Ki Hadjar Dewantara tersebut di atas. Para utusan dari Jakarta disertai tugas mengadakan kontak dengan pandu-pandu lainnya yang tersebar dan dengan instansi-instansi Pemerintah dan masyarakat, untuk minta pertolongan dan bantuan, bila diperlukan. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia berhasil diselenggarakan di Surakarta selama tiga hari pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945, yang dihadiri oleh bekas pemimpin kepanduan: KBI, HW, SIAP, NATIPIJ, JPO, KAKI, Taruna Kembang, Tri Darma, Al Wathoni, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Pandu Kasultanan, Pandu Indonesia dan Pandu Pasundan yang semuanya berjumlah = 300 orang pandu dan pemimpin.

Pada tanggal 28 Desember 1945 "Ikatan ditepa", telah diambil putusan yang sangat penting bagi perkembangan kepanduan Indonesia, yaitu dengan suara bulat membentuk suatu organisasi kesatuan kepanduan dengan nama "Pandu Rakyat Indonesia", yang didasarkan atas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Perikemanusiaan.
 - c. Kebangsaan
 - d. Demokrasi/Kedaulatan Rakyat, dan
 - e. Keadilan Sosial.
2. Setelah berjalan setahun, maka pada akhir bulan Desember 1946 berlangsunglah Kongres Pandu Rakyat I di Surakarta. Selama satu tahun itu tindakan pucuk

pimpinan ditujukan untuk memperkuat organisasi ke dalam. Hasil pekerjaan Pengurus Besar yang telah dicapai adalah antara lain.

- a. Didapatnya pengesahan Pandu Rakyat Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Membuat Anggaran Dasar dan rencana-rencana teknis untuk digunakan sebagai tuntunan di cabang-cabang.
- c. Mengkonsolidasikan cabang-cabang Pandu Rakyat Indonesia di seluruh Jawa, dengan mengadakan kunjungan anggota Kwartir Besar ke cabang-cabang.
- d. Mengatur hubungan dengan cabang-cabang di luar Jawa (Sumatera) dengan perantara radio teleponi.
- e. Mengadakan latihan Pemimpin Pandu Rakyat yang pertama kali dengan diikuti oleh = 70 orang dari hampir seluruh Jawa di Ambarwinangun, Yogyakarta.

Dalam kongres tersebut di atas juga dibicarakan soal hubungan dengan Biro Kepanduan Internasional di London. Pada prinsipnya Pandu rakyat Indonesia setuju masuk menjadi anggota dari Biro itu, tetapi bukan semata-mata tujuan, melainkan akan memperlihatkan kepada dunia luar bahwa pandu-pandu Indonesia pun tidak ketinggalan dalam mengejar cita-cita perikemanusiaan, persaudaraan dan perdamaian seperti apa yang menjadi idam-idaman Bapak Pandu seluruh dunia Lord Baden Powell.

Pandu rakyat Indonesia yang didukung oleh segenap pimpinan pandu dan diikat kuat dengan "Janji Ikatan Sakti", diakui oleh Pemerintah RI sebagai satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947.

Sebagai Menteri PP dan K dalam Kabinet RI pertama yang dibentuk pada tanggal 2 September 1945, diangkat Ki Hadjar Dewantara. Filsafah atau sistem pendidikan Ki Hadjar Dewantara sampai sekarang dijadikan sistem pendidikan kepanduan/kepramukaan, yaitu sistem among:

- a. Ing ngarso sung tulodo.
- b. Ing madyo mangun karso.
- c. Tut wuri handayani.

Untuk menghormati tokoh pendidik Indonesia dan Menteri PP dan K pertama di Indonesia, maka hari lahir Ki Hadjar Dewantara tanggal 2 Mei dijadikan "Hari Pendidikan Nasional", dengan Keppres 306/1959, tanggal 2 Mei 1959.

Pada tanggal 25 Maret 1947 Presiden RI menerima menjadi Pelindung Pandu Rakyat Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1947 dibentuk Kwartir Besar Pandu Putri untuk mengurus segala hal mengenai kepanduan putri, di bawah pimpinan Ibu Sochariah Soetarman.

3. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 20 sampai dengan 22 Januari 1950 dapat diselenggarakan Konggres II di Yogyakarta, yang berlangsung selama 3 hari. Tujuannya adalah untuk mengkaji eksistensi, loyalitas dan keutuhan seluruh

anggotanya, yang ternyata masih tetap kompak, karena meskipun dalam suasana revolusi fisik masing-masing cabang tetap menjalankan kebijaksanaan dan kegiatannya.

Kongres II Pandu Rakyat Indonesia mengeluarkan beberapa keputusan antara lain.

- a. Menerima konsepsi baru, yang memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan bekas organisasinya masing-masing
- b. Di samping mengadakan konsolidasi ke dalam, Pandu Rakyat harus mulai melangkah ke luar menuju pengakuan internasional.
- c. Untuk memperingati genap 5 tahun, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1950 Pandu Rakyat Indonesia akan menerbitkan buku kenang-kenangan "Panca Warsa"

4. Negara RIS tidak berumur panjang, hanya 8 bulan. Usaha-usaha untuk kembali ke Negara Kesatuan RI dilancarkan di mana-mana. Di berbagai daerah timbul gerakan rakyat menuntut pembubaran negara/daerah bagian RIS dan penggabungannya dengan RI di Yogyakarta, yang pada waktu itu dipimpin oleh Mr. Asaat selaku Pemangku Sementara Jabatan (Acting) Presiden RI.

Situasi politik dalam negeri menjadi hangat karena diliputi oleh arus aliran yang menjurus ke liberalisme. Suasana itu menghendaki timbulnya Ormas (organisasi masyarakat) dan Parpol (partai politik) di dalam negara RI yang usianya masih muda itu.

Dalam usaha membentuk/membina kader-kader, beberapa ormas dan parpol mengulangi tradisi lama dengan mendirikan lagi "bagian kepanduannya" antara lain Muhammadiyah dengan HW-nya, NU dengan Pandu Ansor-nya, Parindra dengan Pandu Surya Wiryawan-nya, Golongan Katholik dengan Pandu Katholiknya dan Golongan Kristen dengan Pandu Kristennya. KBI yang pernah menjadi salah satu organisasi kepanduan yang besar, bertepatan dengan hari wafatnya Pangeran Diponegoro, pada tanggal 8 Januari 1952, menyatakan bangun kembali untuk mengikuti jejak dan ingin menerapkan tradisinya yang lama. Maka dalam waktu yang relatif singkat timbullah di sana-sini berbagai organisasi kepanduan baru. Yang dahulu pernah ada didirikan kembali, dan yang telah tergabung dalam Pandu Rakyat menyatakan keluar untuk berdiri sendiri. Karena Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia, maka dengan putusan Menteri PP dan K nomor 2344/ Kab tertanggal 6 September 1951 dicabut pengakuan Pemerintah yang dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 93/Bab A tertanggal 1 Februari 1947 menetapkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya Perkumpulan yang disertai penyelenggaraan pendidikan kepanduan seluruh Indonesia.

5. Meskipun organisasi kesatuan kepanduan Indonesia sudah tidak ada lagi, namun keinginan untuk bersatu antara organisasi-organisasi kepanduan tetap ada. Hasrat untuk bersatu itu diwujudkan dalam bentuk "Federasi" Pada tanggal 16 September 1951 sepuluh hari setelah diterbitkan keputusan Menteri PP dan K nomor:

2344/Kab tersebut di atas, maka wakil-wakil dari Pandu Rakyat Indonesia, Hizbul Wathan, Al Irsyad, Pandu Islam Indonesia, Kepanduan Angkatan Muslimin Indonesia, Pandu Katholik, Perserikatan Kepanduan Tionghwa (Pekerti) dan Perserikatan Pandu-Pandu (PPP) mengadakan konferensi

Konferensi di Jakarta memutuskan berdirinya suatu federasi kepanduan dengan nama Ikatan Pandu Indonesia disingkat Ipindo. Meskipun ke dalam merupakan federasi, akan tetapi ke luar, dalam hubungannya dengan World Organization of Scouts Movement (WOSM) Ipindo merupakan satu kesatuan. Di samping organisasi-organisasi yang tergabung ke dalam Ipindo masih banyak organisasi kepanduan yang belum menggabungkan diri ke dalam Ipindo. Dibentuknya badan federasi Ipindo ini bermaksud pula sebagai jalan ke luar berkenaan dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan organisasi Kepanduan Sedunia. Ipindo akan bertindak sebagai badan yang mewakili Indonesia di dalam organisasi Kepanduan Sedunia untuk golongan putra.

Sehubungan dengan itu Pemerintah kemudian menganggap perlu untuk mengeluarkan Keputusan Menteri PP dan K nomor 8977/Kab tanggal 12 Maret 1952, tentang pengesahan berdirinya Ipindo sebagai badan federasi kepanduan dan sebagai badan sementara dalam hubungannya dengan Pemerintah RI melalui Kementerian PP dan K.

6. Jika organisasi-organisasi kepanduan putra terhimpun dalam suatu badan organisasi Ipindo, maka pada tahun 1954 Indonesia mempunyai 2 federasi Kepanduan Putri, yaitu:
 - a. Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI) dengan anggotanya:
 - 1) Pandu Rakyat Indonesia. Ibu Clementine Arifin Temyang.
 - 2) Pandu Islam Indonesia. Ibu Hanoum Mohammad.
 - 3) Pandu Kristen Indonesia. Ibu Siti Rachmah.
Di bawah pimpinan Komisaris Besar umum. Ibu Surjandari Santo.
 - b. Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO) di bawah pimpinan Ny. H.S. Sutarman dengan anggotanya:
 - 1) Pandu Katholik. Ibu Kwari.
 - 2) Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Ibu H.S. Sutarman.
 - 3) Perserikatan Pandu-Pandu Putri (P4) - Padvindsters Gilde. Ibu Van Pamelan.
 - 4) Persatuan Kepanduan Tionghwa Putri (PERKETIP). Ibu Kwee.

Kwartir Besar PKPI dan POPPINDO bekerja berdampingan.
Di samping kedua federasi tersebut, muncullah kepanduan baru dengan bagian puternya yang belum masuk dalam federasi tersebut, yaitu:
 - a. Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI)
 - b. Kepanduan Anak Marhaen (KAM).
 - c. Pandu Surya Wiryawan (dari PARINDRA), dan sebagainya

Walaupun belum menjadi anggota WAGGGS, hubungan Pandu Putri Indonesia tetap baik dengan WAGGGS dan demikian juga dengan negara-negara lain. Undangan dan bantuan pun tetap diterima dan surat menyurat tetap diadakan. Pada bulan Februari 1958 Lady Baden Powell datang ke Indonesia untuk 3 jam dalam perjalanannya ke Australia, yang disambut oleh PKPI dan POPPINDO.

7. Seminar Kepanduan Nasional Indonesia berhasil diselenggarakan oleh Ipindo di Tugu, Bogor, dari tanggal 21 sampai dengan 24 Januari 1957, di bawah pimpinan Pandu Agung Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Seminar itu dihadiri oleh ahli-ahli pendidikan di samping tokoh-tokoh kepanduan. Juga beberapa pejabat dari Pemerintah nampak hadir dengan membawa makalahnya masing-masing.

Tiap organisasi kepanduan mengirimkan utusan-utusannya yang berkaliber besar. Seminar dikunjungi oleh kira-kira 83 orang dari pelbagai organisasi yang ada di Indonesia baik anggota Ipindo maupun bukan. Organisasi kepanduan Ipindo yang hadir dalam seminar itu ialah: Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia, Pandu Al Washiah, Kepanduan Ansor, SIAP, HW, Pandu Kristen Indonesia, Pandu Katholik, KAMI, KBI, Kepanduan Surya Wiryawan, Perserikatan Kepanduan Tionghwa (Perketi) dan Persatuan Pandu Pandu (PPP).

Organisasi kepanduan di luar Ipindo yang mengunjungi seminar adalah antara lain, Kepanduan Bhayangkara, Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Indonesia dan Kepanduan Mojopahit

Organisasi Pandu Putri yang hadir ialah dari PKPI yaitu, Pandu Kristen Indonesia, Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia, POPPINDO yaitu: KBL, PPPP (Perserikatan Pandu Pandu Putri), Pandu Katholik dan Perketip (Persatuan Pandu Tionghwa Putri).

8. Pertemuan pertama Ipindo diadakan pada tanggal 6 - 8 Mei 1960, dipimpin oleh Pandu Agung Bapak Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan mengundang Pejabat Presiden Ir. H. Djuanda, dan juga dihadiri oleh Menteri PP dan K. Dalam pertemuan itu Bapak Djuanda berkenan menyampaikan amanat penting sehubungan dengan keadaan negara kita telah kembali ke UUD 1945 (Dekret Presiden 5 Juli 1959).

Pertemuan telah mengambil keputusan antara lain

- a. Bapak Sri Sultan diangkat menjadi Bapak Pandu. Sebutan Pandu Agung ditiadakan.
- b. Menyusun Kebijakan Federasi baru untuk memberi kesempatan kepada semua organisasi kepanduan masuk dalam Ipindo.
- c. Mengesahkan AD dan ART baru.

Pada pertemuan kedua tanggal 19 Mei 1960, Bapak Pandu mempertemukan ketiga badan Federasi Ipindo, Poppindo dan PKPI yang menghasilkan kebulatan pimpinan ketiga badan tersebut, untuk masuk ke dalam persatuan kepanduan di bawah satu pimpinan.

Pertemuan ketiga pada tanggal 26 - 28 Mei 1960 menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Ipindo dinyatakan demisioner. Para petugasnya menyerahkan mandatnya kepada Pandu-pandu.
- b. Ipindo bersama-sama Poppindo dan PKPI melebur diri ke dalam badan federasi baru Perkindo (Persatuan Kependuan Indonesia).
- c. Pimpinan Harian Perkindo dipegang oleh Bapak Pandu.
- d. Bapak Pandu melantik anggota-anggota Dewan Kependuan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil organisasi yang tergabung dalam Perkindo.
- e. Meneruna KPI (Kependuan Putra Indonesia) menjadi anggota Perkindo.

Pertemuan keempat pada tanggal 5 Juli 1960 menghasilkan keputusan

- a. Bapak Pandu melantik anggota-anggota Dewan Kependuan Nasional.
- b. Kependuan Bhayangkara diterima menjadi anggota Perkindo.

Ipindo, Poppindo dan PKPI yang telah diintegrasikan menjadi Perkindo itu, berusaha keras untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat yang mendapat kepercayaan dan kesempatan dari Presiden untuk menghimpun dan mempersatukan seluruh potensi kependuan yang ada, namun sistem federasinya itu ternyata tidak berhasil

9. Sidang MPRS dari tanggal 19 November sampai dengan 3 Desember 1960, telah membahas pendidikan dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, khususnya yang menyangkut bidang pendidikan kependuan. Apa yang sudah menjadi ketetapan MPRS yang menyangkut bidang kependuan adalah merupakan hasil secara maksimal yang dapat dicapai, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dasar Pendidikan di bidang kependuan adalah Pancasila.
 - b. Perlu diadakan penertiban dalam sistem kependuan.
 - c. Pendidikan kependuan supaya diintegrasikan, dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka.
 - d. Kependuan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme.

Akhirnya gagasan Bung Karno yang disampaikan di Desa Semanggi pada tahun 1959 untuk mendirikan Gerakan Pramuka sebagai gantinya gerakan kependuan, menjadi kenyataan.

Setelah dipertimbangkan dengan akal sehat, maka demi kepentingan persatuan dan kesatuan, dan menyadari akan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Presiden itu memang logis, akhirnya semua pihak dapat menerima dengan sikap yang lebih tegas yaitu: "kesetiaanku terhadap organisasi akan kuhentikan, apabila kesetiaanku terhadap negara memanggil"

Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 1961 pukul 22.00 WIB para tokoh dan pemimpin pandu yang mewakili organisasi-organisasi kependuan yang ada di Indonesia dikumpulkan di Istana Merdeka untuk mendengarkan amanat Presiden yang bertindak sebagai Madataris MPRS, yang berkewajiban melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS. Beliau memutuskan untuk mengambil tindakan tegas

membubarkan semua organisasi kepanduan, untuk dilebur ke dalam satu organisasi baru yang diberi nama "Gerakan Pramuka", sebagai satu-satunya organisasi yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia

Pada hakekatnya Gerakan Pramuka itu terbentuk karena rasa tanggungjawab atas keselamatan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa dan negara, dan karena didorong oleh kesadaran dan keinginan untuk membantu Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan anak-anak dan pemuda Indonesia menjadi tenaga-tenaga pembangunan

10. Setelah mendengar laporan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Brigjen TNI dr. Azis Saleh, bahwa 60 organisasi kepanduan di Indonesia pada prinsipnya setuju dipersatukan, maka pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara, Bung Karno selaku Presiden/Mandataris MPRS menyampaikan pidato kepada para tokoh dan pemimpin pandu yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia

Pokok-pokok yang penting dalam pidato Presiden itu adalah sebagai berikut.

- a. Pengalaman yang tidak berkesan di hati tentang kehidupan kepanduan yang ada di Indonesia selama 15 tahun setelah negara Indonesia merdeka
- b. Perkembangan keanggotaan jumlahnya tidak melebihi setengah juta, padahal anak-anak dan pemuda yang bisa menjadi pandu sedikitnya ada 20 juta orang
- c. Kepanduan yang ada harus diperbaharui dan disesuaikan dengan pertumbuhan dan harapan Bangsa dan masyarakat dalam rangka mengembangkannya Amanat Penderitaan Rakyat. Untuk dapat menyesuaikan diri itu, maka metode dan aktivitas pendidikan harus disesuaikan dan diintegrasikan dengan kepentingan Bangsa dan masyarakat
- d. Cita-cita/konsepsi persatuan dijadikan Perintah Presiden agar seluruh organisasi kepanduan dilebur menjadi satu organisasi kepanduan yang diberi nama Pramuka
- e. Untuk menyelenggarakan perintah tersebut dibentuk satu panitia yang terdiri dari 4 (empat) orang, ialah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri PP dan K Dr. Prijono, Menteri dr. Azis Saleh dan Menteri Achmadi.

Tanggal 9 Maret disebut "Hari Tunas Gerakan Pramuka".

Panitia Empat orang itu belum dapat menyelenggarakan rapat karena Surat Keputusan tentang pengangkatan/pembentukan panitia belum ada. Namun ternyata tanpa sepengetahuan Ketua Panitia dan anggota panitia yang lain, Menteri Prijono telah menyusun konsep dan secara pribadi diajukan kepada Presiden. Konsep yang diajukan itu seakan-akan hasil karya Panitia Empat Orang, sehingga menurut Sekretaris Negara Mr. Ichsan, kemudian ditandatangani oleh Presiden sebagai Keppres No. 109 tahun 1961, tanggal 30 Maret 1961. Selain itu telah dikeluarkan juga Keppres no. 112 tahun 1961, tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksanaan Pembentukan Gerakan Pramuka, yang isinya tidak sesuai dengan isi pidato Presiden tanggal 9 Maret 1961. Hal ini diberitahukan oleh Hs. Mutahar

kepada dr. Azis Saleh, yang seketika itu juga pergi menghadap Presiden di Bandung untuk melaporkan hal tersebut di atas.

Setelah mendengar laporan dr. Azis Saleh dan mengetahui bahwa yang telah ditandatangani oleh beliau itu bukan hasil Panitia Empat, maka Brigjen Santoso diperintahkan segera ke Jakarta, agar Keppres no 109 tahun 1961 ditahan dan tidak dilembarkan.

Kemudian pada tanggal 11 April 1961 dikeluarkan Keppres No. 121 tahun 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka, sebagai pengganti Keppres No. 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961. Berdasarkan Keppres No. 121 tahun 1961 tersebut Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka menjadi Panitia Lima Orang, yang terdiri dari

- a. Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai Ketua Panitia
- b. Brigjen TNI dr. Azis Saleh, Menteri Pertanian
- c. Prof. Dr. Prijono, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
- d. Muljadi Djojomartono, Menteri Kesejahteraan Sosial
- e. Achmadi, Menteri Transokp dan Pembangunan Masyarakat Desa

Pada waktu Presiden berangkat ke luar negeri, dan dalam rombongan beliau turut juga Prof. Dr. Prijono. Panitia Lima Orang tersebut (Prof. Dr. Prijono diwakili oleh Sutojo Arcundoto, Kepala Biro Pemuda pada Dep. P D & K) berhasil menyusun konsep keputusan tentang Pembentukan Gerakan Pramuka dan konsep Anggaran Dasar.

Konsep Anggaran dasar disusun oleh Brigjen TNI dr. Azis Saleh yang dibantu oleh Soenardjo Atmodipuro, dr. Sudarsono, D. Sudibjo, M. Mashadi dan Kombespol Hartono.

H. S. Mutahar menyusun penjelasan tertulis tentang

Pokok-pokok pikiran, pengertian, pendapat dasar dan landasan pengorganisasian usaha pendidikan anak-anak dan pemuda, di samping pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah.

Pada waktu Presiden masih di luar negeri, konsep Anggaran Dasar tersebut diajukan kepada Pejabat Presiden Ir. H. Djuanda, yang segera dituangkan dalam Keppres No. 238 Tahun 1961 dan ditandatangani pada tanggal 20 Mei 1961 oleh Pejabat Presiden Ir. H. Djuanda. Konsep Anggaran Dasar ditetapkan sebagai lampiran Keppres tersebut. Berdasarkan Keppres No. 238 itu, ditetapkan bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Organisasi-organisasi lain yang sama, atau menyerupai dilarang. Anggaran Dasar tersebut dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei kemudian disebut "Hari Permulaan Tahun Kerja".

Pada tanggal 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan berkumpul di Istana Olahraga Senayan, Jakarta, dengan membawa bendera organisasinya masing-masing. Mereka bersama-sama dengan sukarela dan tulus ikhlas membuat pernyataan untuk meleburkan diri ke dalam satu organisasi kepanduan yang bernama Gerakan Pramuka, dan untuk seterusnya akan patuh dan setia mengabdikan diri bagi kepentingan anak-anak dan pemuda Indonesia melalui Gerakan Pramuka. Seluruh bendera yang mereka bawa dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan kenangan dan disimpan dalam museum. Tanggal 30 Juli kemudian disebut "Hari Ikrar Gerakan Pramuka".

Badan Pimpinan Pusat secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-45, terdiri dari Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas) beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk dalam Kwartir Nasional (Kwarnas) 17 orang, dan dalam Kwartir Nasional Harian (Kwarnari) 8 orang. Hanya dalam realisasinya berdasarkan Keppres No 447 tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang, yang susunan anggotanya ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|----------------|
| a | Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI | Ketua |
| b | Sultan Hamengku Buwono IX | Wakil Ketua I |
| c | Brigjen TNI dr. Azis Saleh, Menteri Pertanian | Wakil Ketua II |
| d | 67 orang sebagai Anggota | |

Susunan anggota Kwarnas ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|---|--|---------------|
| a | Sultan Hamengku Buwono IX | Ketua Kwarnas |
| b | Brigjen TNI dr. Azis Saleh | Wakil Ketua |
| c | 15 orang sebagai Andalan Nasional Urusan | |

- 11 Pada tanggal 14 Agustus 1961, organisasi Gerakan Pramuka dengan resmi diperkenalkan kepada rakyat Indonesia bukan saja di Ibukota Jakarta, tetapi di seluruh tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sebanyak 10.000 anak dan pemuda Indonesia anggota Gerakan Pramuka mengadakan pawai pembangunan dan berdefile di depan Presiden. Presiden se usai melantik Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas), Kwartir Nasional (Kwarnas), dan Kwartir Nasional Harian (Kwarnari) berkenan memberikan amanat kepada segenap anggota Gerakan Pramuka, serta segenap masyarakat Indonesia yang hadir kemudian diteruskan dengan penganugerahan tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka sebagai Lambang Perjuangan untuk dijunjung tinggi dan dipertahankan kemuliaannya disegala lapangan. Tanggal 14 Agustus kemudian disebut sebagai "Hari Pramuka".

B. MASALAH YANG DIHADAPI

- 1 Dengan adanya era reformasi yang ingin meninggalkan kebijakan sentralisme dan mengutamakan desentralisasi, timbul hasrat untuk mendirikan kembali organisasi kepanduan.

2. Pada tanggal 18 November 1999 di Yogyakarta telah diselenggarakan "Deklarasi Kebangkitan kembali Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan", bertempat di Stadion Kridosono. Keputusan untuk mendeklarasikan gerakan kepanduan ini dinyatakan sebagai hasil muktamar Muhammadiyah pada tahun 1998.
3. Dalam pertemuan dengan PP Muhammadiyah pada tanggal 9 November 1999, sehari sebelum deklarasi tersebut diselenggarakan, dikemukakan oleh Kwarnas tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tahun 1961 yang menyatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Badan-badan lain yang sama sifatnya yang menyerupai Gerakan Pramuka dilarang adanya. Dikemukakan pula bahwa Gerakan Pramuka diakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia oleh WOSM. Disampaikan pula bahwa Kwarnas tidak mempunyai wewenang untuk melarang deklarasi yang akan diselenggarakan di Yogyakarta itu. Yang dapat melarangnya hanyalah Presiden Republik Indonesia dengan cara mencabut terlebih dahulu Keppres No. 238 melalui penerbitan Keppres yang baru. Pada akhir pertemuan itu dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Kwarnas masih tetap membuka diri untuk menerima mereka dalam lingkup Gerakan Pramuka. Kwarnas tetap dan senantiasa mengajak PP Muhammadiyah untuk bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan, khususnya dalam Gerakan Pramuka.
4. Dalam mengantisipasi kemungkinan berdirinya kembali organisasi kepanduan lainnya, perlu dibicarakan masa depan Gerakan Pramuka dengan berbagai alternatif keorganisasian kepanduan dan konsekuensinya.

C ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

1. Alternatif pertama adalah Gerakan Pramuka tetap seperti keadaan sekarang dengan dasar Keppres No. 238 Tahun 1961. Tidak ada perubahan berarti dalam AD/ART Gerakan Pramuka. Yang perlu dilaksanakan adalah konsolidasi organisasi dan program yang memenuhi aspirasi para anggota Gerakan Pramuka. Alternatif pertama ini adalah sesuai dengan kesimpulan yang diambil dalam Sarasehan tentang Gerakan Pendidikan Kepanduan Dalam Era Reformasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (Hipprada) pada tanggal 27 - 28 Juni 2000 di Ciater, Subang, Jawa Barat.
 - a. Dalam era reformasi sekarang, perlu diusahakan agar Gerakan Pramuka tetap menjadi wadah dan pelopor dalam mengembangkan idealisme, patriotisme, dan nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Aspirasi mendirikan organisasi kepanduan khusus tidak dapat dihalangi karena bertentangan dengan asas demokrasi, namun harus diingat bahwa organisasi kepanduan dunia hanya mengakui satu organisasi yang mewakili sebuah negara, dalam hal ini Gerakan Pramuka.

- c Gerakan Pramuka harus tetap eksis dan berani melakukan pembaharuan/perubahan, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan dan kebijakan yang keliru perlu segera dihentikan dan diganti dengan melaksanakan prinsip dasar dan metodik pendidikan kepramukaan.
 - 2) Organisasi kepanduan/kepramukaan harus mandiri, jangan terlalu diintervensi. basis sekolah harus diubah menjadi basis wilayah Pendidikan kepramukaan/kepanduan harus dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Anak-anak/pemuda dan orang dewasa harus menjadi Pramuka dengan sukarela
 - 3) Tata cara dan aturan yang berbentuk/bersifat "instruksi" diganti dengan "back to the basic principles of scouting"
 - 4) Para Andalan dan Mabi bukan pejabat/birokrat tetapi orang-orang yang berminat, peduli dan mengerti pendidikan serta berjiwa pandu
 - d Materi dan metode pendidikan kepanduan/kepramukaan harus disesuaikan dengan masalah aktual dan tantangan bangsa, harus dikemas agar menarik, menumbuhkan motivasi dan menarik anak dan pemuda serta mampu mengarahkan para anggotanya
 - e Kwarnas dan Depdiknas serta instansi lain yang terkait, perlu melakukan pengkajian dan segera mengambil langkah-langkah pembenahan Gerakan Pramuka dan mengupayakan agar pendidikan kepanduan dapat menarik dan dicintai anak dan pemuda
2. Alternatif kedua adalah apabila Keppres No 238 Tahun 1961 dicabut, sehingga Gerakan Pramuka tidak lagi merupakan satu-satunya organisasi kepanduan. Apabila ini terjadi, ada beberapa kemungkinan:
- a Gerakan Pramuka tetap berdiri sebagai organisasi kepanduan, di samping organisasi kepanduan lainnya. Selama WOSM mengakuinya, Gerakan Pramuka merupakan organisasi kepanduan anggota WOSM di Indonesia. Tidak ada perubahan berarti dalam AD/ART Gerakan Pramuka.
 - b Gerakan Pramuka bersama-sama dengan organisasi kepanduan lainnya membentuk sebuah federasi kepanduan Indonesia seperti IPINDO/PERKINDO dan federasi inilah yang kemudian menjadi anggota WOSM. Tidak ada perubahan berarti dalam AD/ART Gerakan Pramuka
 - c Gerakan Pramuka menjadi federasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi-organisasi kepanduan. Dalam hubungan ini AD/ART Gerakan Pramuka mengalami perubahan besar. Gerakan Pramuka dengan bentuk federasi ini menjadi anggota WOSM

3. Perubahan apapun yang terjadi, konsolidasi organisasi dan program Gerakan Pramuka harus dimantapkan, yang harus lebih banyak diarahkan kepada sistem desentralisasi, sehingga Kwarnas tidak lagi bersifat sentralistis. Pemberdayaan Kwarda, Kwarcab, dan Kwarran menjadi lebih tampil kemuka.
4. Sudah saatnya untuk membedakan antara *scouts education* untuk semua anak SD dan *scouts movement* untuk anggota-anggota Gerakan Pramuka yang telah dilantik sebagai anggota Gerakan Pramuka, sehingga jumlah anggota lebih dapat dikelola dengan baik (*manageable*)

Jakarta, 15 November 2000

Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH